

DMO GAS JADI JALAN TENGAH

Bisnis, JAKARTA — Kewajiban pasok dalam negeri atau *domestic market obligation* gas bumi bisa menjadi jalan tengah untuk memastikan ketersediaan komoditas itu guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri, sehingga daya saingnya tetap terjaga.

Affiah R. Nurdifa
affiah.nurdifa@bisnis.com

Kebijakan *domestic market obligation* alias DMO diyakini bisa menjamin pasokan gas bumi di dalam negeri yang belakangan dikhawatirkan bakal mengalami defisit akibat menurunnya produksi di sejumlah wilayah kerja. Musababnya, kebijakan DMO bakal mengikat pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam jumlah tertentu.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan bahwa DMO gas alam menjadi langkah strategis untuk memastikan pasokan gas yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri domestik, pembangkit listrik, hingga transportasi.

"Selama ini ketertantangan terhadap skema harga ekspor atau mekanisme pasar penuh cenderung menyulitkan sektor industri nasional untuk mendapatkan harga gas yang kompetitif," kata Anggawira kepada *Bisnis*, Kamis (17/7).

Menurut dia, penerapan DMO gas dapat menjadi mekanisme kontrol sekaligus memastikan bahwa sebagian dari produksi gas nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang wajar. Terlebih, kebutuhan gas domestik terus mengalami peningkatan.

Merujuk data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pemanfaatan gas bumi didominasi untuk industri yang sebanyak 25,44%, dan ekspor hingga 23,4%. Selanjutnya, untuk pemanfaatan gas untuk domestik LNG sebesar 13,09%, kelistrikan 12,93%, dan pupuk 12,25%.

"Secara prinsip, DMO gas sangat efektif untuk menjamin kebutuhan domestik dan mengurangi tekanan terhadap opsi impor," tuturnya.

Dari sisi keekonomian, Anggawira menilai bahwa DMO gas akan menciptakan kepastian harga di pasar domestik. Hal tersebut penting bagi pelaku usaha, karena volatilitas harga gas saat ini seringkali mengganggu perencanaan produksi dan investasi, terutama di sektor hilir. Akan tetapi, Anggawira mewantiwanti agar implementasi DMO tetap mempertimbangkan insentif bagi produsen agar tidak mengurangi minat investasi di sektor hulu.

Dalam hal ini, skema harga DMO gas perlu disusun secara transparan dan adil, baik bagi kon-

sumen domestik maupun produsen agar tetap terjadi keseimbangan antara daya saing industri dan keberlanjutan proyek migas.

Sebagai solusi jangka pendek, Anggawira melihat bahwa kebutuhan impor gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG) tidak bisa dihindari, terutama mengingat adanya ketimpangan antara lokasi sumber gas dan pusat permintaan alias *mismatch spatio-temporal*, serta keterbatasan infrastruktur distribusi domestik.

"Maka impor LNG menjadi jembatan solusi sementara," imbuhnya.

Usulan impor gas dalam bentuk LNG juga muncul dari Komisi XII DPR. Anggota Komisi XII Eddy Soeparno mendukung upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan permintaan gas bumi dalam negeri yang meningkat, salah satunya melalui impor LNG.

Dia menilai kebijakan untuk impor LNG perlu didorong agar tidak ada kegagalan dari sektor industri manufaktur pengguna gas bumi. Dia khawatir kekurangan gas memicu penghentian operasional industri.

"Untuk sementara, di tengah-tengah sekarang berkurangnya pasokan gas secara signifikan, diberikan keluasaan agar kran impor terutama untuk LNG itu bisa dibuka," jelas Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gas untuk industri menjadi penting demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh pemerintah.

daya dalam negeri. Kendati, opsi untuk impor gas dari wilayah kerja Pertamina Group di berbagai negara tetap terbuka.

Direktur Utama PGAS Arief Setiawan Handoko mengatakan bahwa pihaknya memahami permintaan gas dalam negeri yang terus meningkat, tetapi impor LNG menurutnya bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya enggak *purely push* harus impor, tapi saya mencoba mendapatkan LNG yang diproduksi dari domestik *dulu*," kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7).

Apalagi, dia menyebutkan bahwa saat ini produksi gas di Indonesia mencapai 6.600 juta standar kaki kubik per hari MMscfd yang sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya, impor LNG untuk memenuhi kebutuhan gas domestik belum mendesak untuk dilakukan, sehingga PGAS bakal memilih untuk mengutamakan LNG *existing* yang diproduksi dalam negeri.

Dalam kesempatan itu, Arief juga mengakui adanya *mismatch* atau ketidakcocokan antara tempat produksi dengan lokasi lonjakan permintaan, serta waktu produksi dan kelengkapan infrastruktur.

Untuk itu, dirinya mendorong pembangunan infrastruktur dan koneksi antarmolekuler pipa gas yang belum tersambung agar bisa membuat aliran gas dari sumber ke wilayah permintaan bisa tersambung.

Deputi Keuangan dan Komer-



DMO gas sangat efektif untuk menjamin kebutuhan domestik dan mengurangi tekanan terhadap opsi impor.

data realisasi pemanfaatan gas bumi terkini adalah 69,26% dari keseluruhan gas bumi yang diproduksi nasional untuk permintaan domestik.

"Jadi sisanya adalah ekspor, sekitar 30% dan *mostly* untuk meneruskan kontrak-kontrak jangka panjang yang sudah berjalan, khususnya dari sisi LNG di Bontang dan Tangguh," katanya.

Dia juga membeberkan bahwa sejak tahun 2023 tren produksi gas terus meningkat. SKK Migas optimistis produksi gas dalam beberapa tahun ke depan akan positif seiring dengan tambahan produksi dari sejumlah lapangan. "Peningkatan *supply* yang meningkat secara perlahan, tapi pasti sekitar 2%—3% setahun sejak 2023 sampai dengan 2024, dan kami proyeksikan 2025 juga akan terus meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa terdapat tantangan *mismatch* antara sumber pasokan gas dengan wilayah peningkatan *demand*. Terlebih, infrastruktur transmisi yang masih menjadi

"Di sisi lain ada wilayah yang surplus juga yang tadi mengalami kendala-kendala dari sisi belum adanya infrastruktur yang bisa *men-deliver* gas tersebut," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya menyelesaikan surplus pasokan di Jawa Timur dengan membangun pipa Cirebon—Semarang hingga ke Jawa Barat. Proyek ini masih dalam tahap konstruksi.

Sebelumnya, perusahaan asal Korea Selatan yang berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) juga membeberkan bahwa harga gas menjadi salah satu tantangan saat mengoperasikan pabrik di Indonesia.

Direktur Government and Public Affairs KCC Glass Indonesia Arintoko Utomo mengatakan, saat pertama berencana investasi di Indonesia, KCC Glass dijanjikan penyewaan lahan dengan izin 80 tahun dan fasilitas lengkap, termasuk HGBT US\$6 per MMBtu. Kendati demikian, realisasi saat ini dinilai sangat berbeda.

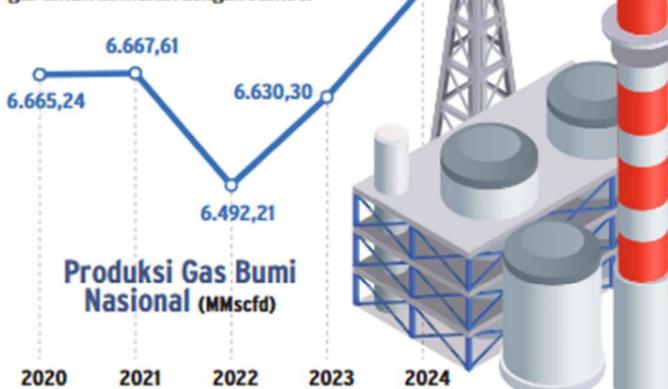
"Tapi ternyata buat teman-teman investor di Korea Selatan ini mengejutkan. Kami tanda tangan MoU pada 2020, sampai dengan 2024 belum dapat kepastian mengenai *supply* dan harga gas. Kemudian, kami tanda tangan *supply* gas dengan PCGN yang mengejutkan adalah ternyata kami harus tanda tangan di harga yang sangat tinggi, di harga pasar," tuturnya.

Saat ini, KCC Glass mendapatkan harga gas senilai US\$9,5 per MMBtu atau di atas harga yang dijanjikan sejak awal. Pihaknya mengaku sempat mendapatkan HGBT untuk 2 bulan, kemudian diperpanjang pada 4 bulan berikutnya untuk 5 tahun ke depan. ☒

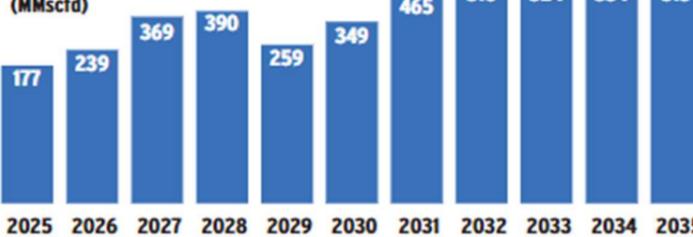


PRODUKSI NASIONAL

Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) tengah mencari solusi pemenuhan kebutuhan gas untuk domestik dengan sumber



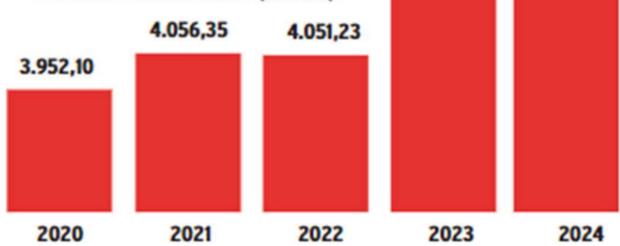
Proyeksi Defisit Pasokan Gas (MMscfd)



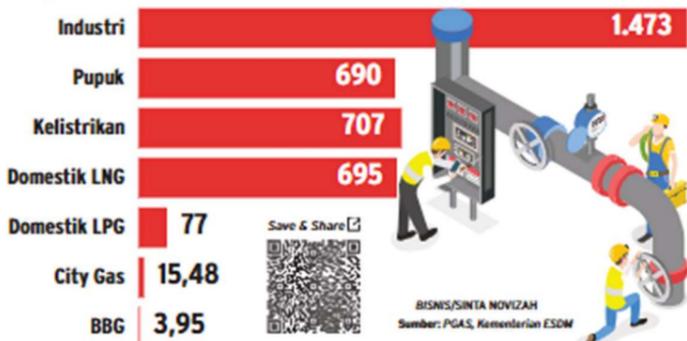
spesialisasi SKK Migas Kurnia Chairy mengatakan,

tantangan utama.

Kebutuhan Pasokan Gas Bumi Domestik (MMscfd)



Porsi Pemanfaatan Gas Bumi 2024 (BBtud)



- Defisit gas bumi terbesar diperkirakan terjadi pada 2034, dengan volume mencapai minus 534 MMscfd.
- Hingga kini industri masih menjadi sektor yang paling banyak memanfaatkan gas domestik.
- Pengembangan infrastruktur gas bumi di dalam negeri masih kalah masif dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.